

Received : 16 Jan 2025

Accepted : 16 Jan 2025

Published : 10 Feb 2025

**PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP EFEKTIVITAS PENGEMBANGAN DESA WISATA
MUKAPAYUNG DI KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Faizal Arief Maulana Yusuf¹Agustina Setiawan²Yovinus³

1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani

Email Korespondensi : Icalcakti@gmail.com

Abstrak

Desa Wisata merupakan salah satu kegiatan pariwisata yang membawa dampak ekonomi bagi masyarakat karena masyarakat desa terlibat dalam pengembangan desa wisata. Konsep Desa Wisata menempatkan masyarakat sebagai aktor utama penggerak pembangunan desa wisata. Desa wisata dikatakan sebagai produk pariwisata pedesaan yang menawarkan pengalaman kehidupan pedesaan, daya tarik alam sekitar, budaya dan tradisi masyarakat lokal dan elemen unik lainnya yang dimiliki sebuah desa untuk menarik kedatangan wisatawan (Syaiful, 2021: 1007). Desa wisata memiliki karakter khusus yang menarik wisatawan untuk memperoleh pengalaman yang dipandang memberikan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan baru bagi wisatawan. Konsep Desa Wisata menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengembangan pariwisata di desa. Dalam pengelolaannya, desa wisata memberikan kebebasan bagi masyarakat setempat memaksimalkan potensi yang ada di desa.

Desa Mukapayung merupakan salah satu desa terpilih sebagai desa wisata yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, namun pada kenyataannya saat ini potensi yang dimiliki belum sepenuhnya dioptimalkan menjadi pendukung wisata dan belum terlalu berkembang sebagaimana mestinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh implementasi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap efektivitas pengembangan Desa Wisata Mukapayung di Kabupaten Bandung Barat.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis regresi untuk menganalisis data yang diperoleh melalui survey serta melalui studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pemerintah Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas pengembangan Desa Wisata Mukapayung di Kabupaten

Received : 16 Jan 2025

Accepted : 16 Jan 2025

Published : 10 Feb 2025

Bandung Barat. Faktor-faktor seperti komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi memiliki dampak yang positif terhadap peningkatan efektivitas pengembangan Desa Wisata Mukapayung di Kabupaten Bandung Barat.

Tipe penelitian menggunakan metode survey yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Variabel yang diteliti yaitu implementasi kebijakan Pemerintah Daerah sebagai variabel independen/bebas (X), dan variabel efektivitas pengembangan Desa Wisata Mukapayung di Kabupaten Bandung Barat sebagai variabel dependen/terikat (Y).

Penelitian ini dilakukan dengan menguji pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun desain penelitian yang peneliti gunakan adalah desain penelitian kausal. Seperti yang diutarakan Hasan (2002: 33) bahwa: “Desain penelitian kausal berguna untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, atau bagaimana satu variabel mempengaruhi variabel lainnya”.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, bahwa implementasi kebijakan Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengembangan Desa Wisata Mukapayung di Kabupaten Bandung Barat. Maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah Analisis deskriptif implementasi kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan pengukuran empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan termasuk dalam kategori “Cukup” dengan skor capaian tanggapan responden sebesar 64.14% (52.01% - 68.00%). Dapat diinterpretasikan bahwa persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan Pemerintah Daerah tentang penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Bandung Barat termasuk dalam predikat cukup. Terdapat persentase skor tertinggi sebesar 64.72% pada dimensi struktur birokrasi, sedangkan persentase dimensi terendah sebesar 63.33% pada dimensi komunikasi.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Efektivitas, Desa Wisata

Abstract

Tourism Village is one of the tourism activities that has an economic impact on the community because the village community is involved in the development of tourism villages. The concept of Tourism Village places the community as the main actor driving the development of tourism villages. Tourism villages are said to be rural tourism products that offer rural life experiences, natural attractions, local culture and traditions and other unique elements owned by a village to attract tourists (Syaiful, 2021: 1007). Tourism villages have special characteristics that

Received : 16 Jan 2025

Accepted : 16 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

attract tourists to gain experiences that are seen as providing new knowledge, understanding and skills for tourists. The concept of Tourism Village places the community as the main actor in the development of tourism in the village. In its management, tourism villages provide freedom for local people to maximize the potential in the village.

Mukapayung Village is one of the selected villages as a tourism village developed by the West Bandung Regency Government, but in reality, the potential it has has not been fully optimized to support tourism and has not developed as it should. The purpose of this study was to examine the influence of the implementation of Regional Government policies on the effectiveness of the development of Mukapayung Tourism Village in West Bandung Regency.

This study uses descriptive analysis methods and regression analysis to analyze data obtained through surveys and through documentation studies. The results of the study indicate that the implementation of Regional Government policies has a significant influence on the effectiveness of the development of Mukapayung Tourism Village in West Bandung Regency. Factors such as communication, resources, disposition and bureaucratic structure have a positive impact on increasing the effectiveness of the development of Mukapayung Tourism Village in West Bandung Regency.

The type of research uses a survey method, namely research that takes samples from a population and uses a questionnaire as the main data collection tool. The variables studied are the implementation of Regional Government policies as independent/free variables (X), and the variable of the effectiveness of the development of Mukapayung Tourism Village in West Bandung Regency as dependent/bound variables (Y).

This research was conducted by testing the influence between independent variables on the dependent variable. The research design used by the researcher is a causal research design. As stated by Hasan (2002: 33) that: "Causal research design is useful for analyzing the relationship between one variable and another, or how one variable affects another variable".

Based on the results of the research and discussion in the previous chapter, the implementation of Regional Government policies has a positive and significant effect on the effectiveness of the development of Mukapayung Tourism Village in West Bandung Regency. So the conclusion that can be drawn in this study is Descriptive analysis of the implementation of Regional Government policies based on the measurement of four factors that influence policy implementation is included in the category of "Sufficient" with a score of respondent response achievement of 64.14% (52.01% - 68.00%). It can be interpreted that public perception of the implementation of Regional Government policies on tourism management in West Bandung Regency is included in the predicate sufficient. There is the highest percentage score of 64.72% in the bureaucratic structure dimension, while the lowest percentage dimension is 63.33% in the communication dimension.

Received : 16 Jan 2025

Accepted : 16 Jan 2025

Published : 10 Feb 2025

Keywords: Policy implementation, Effectiveness, Tourism Village

PENDAHULUAN

Kepariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Bangsa Indonesia memiliki keadaan alam, flora, dan fauna, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, yang merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Desa Wisata merupakan salah satu kegiatan pariwisata yang membawa dampak ekonomi bagi masyarakat karena masyarakat desa terlibat dalam pengembangan desa wisata. Konsep Desa Wisata menempatkan masyarakat sebagai aktor utama penggerak pembangunan desa wisata. Desa wisata dikatakan sebagai produk pariwisata pedesaan yang menawarkan pengalaman kehidupan pedesaan, daya tarik alam sekitar, budaya dan tradisi masyarakat lokal dan elemen unik lainnya yang dimiliki sebuah desa untuk menarik kedatangan wisatawan (Syaiful, 2021: 1007). Desa wisata memiliki karakter khusus yang menarik wisatawan untuk memperoleh pengalaman yang dipandang memberikan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan baru bagi wisatawan. Konsep Desa Wisata menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengembangan pariwisata di desa. Dalam pengelolaannya, desa wisata memberikan kebebasan bagi masyarakat setempat memaksimalkan potensi yang ada di desa.

Pembangunan desa wisata mampu memberikan dampak langsung yang tinggi terhadap ekonomi lokal dan upaya pemeliharaan sosial budaya, serta pelestarian lingkungan. Pembangunan desa wisata terutama ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal. Meskipun begitu, banyak desa wisata yang sudah didirikan masih belum dikelola dengan maksimal karena berbagai masalah, seperti keterbatasan akses dan infrastruktur, kurangnya kesiapan sumber daya manusia, kurangnya penguasaan keterampilan

Received : 16 Jan 2025

Accepted : 16 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

dibidang pariwisata, serta keterbatasan jaringan yang dimiliki.

Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat dan memiliki banyak potensi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat terutama melalui sektor pariwisata. Keindahan pemandangan yang dikelilingi oleh pegunungan serta memiliki udara sejuk menjadikan Kabupaten Bandung Barat mempunyai pesona tersendiri dan menjadi ketertarikan wisatawan, baik domestik maupun dari mancanegara.

Desa Mukapayung Kecamatan Cililin merupakan salah satu desa terpilih sebagai desa wisata yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Kawasan Lembah Curugan Gunung Putri merupakan salah satu destinasi wisata alam di Desa Mukapayung. Di Lembah Curugan, pengunjung dapat menikmati keindahan alam sembari melakukan aktivitas seperti tracking, hiking, climbing, dan camping. Destinasi wisata alam lain seperti Gunung Hanyawong, Gunung Kasep Roke, Puncak Majapait, Situs Mundinglaya, Situs Mukapayung, Situs Batulangkob, Situs Arca dan Peninggalan Adipati Ukur. Ada pula destinasi budaya di Desa Mukapayung seperti Sanggar Seni Gending Lestari dan Sanggar Seni Katineung. Selain itu terdapat juga produk unggulan desa berupa produk kopi dan madu.

Beragam potensi wisata ini dimotori pengelolaannya oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Mukapayung yang telah dibentuk pada tahun 2022. Melalui keberadaan organisasi Pokdarwis Desa Mukapayung, maka diharapkan penataan dan pengelolaan potensi wisata desa terlaksana dengan baik. Fokusnya pada fasilitas wisata, peningkatan kapasitas masyarakat, dan promosi wisata. Selain keberadaan Pokdarwis, pengelolaan potensi wisata Desa Mukapayung juga melibatkan peran Patriot Desa Jawa Barat yang bertugas sebagai fasilitator pemberdayaan desa untuk membangun inisiatif dan meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan wisata. Patriot Desa bersama Penggerak Lokal (*local champion*) Desa Mukapayung berperan dalam melakukan pemetaan potensi wisata desa hingga mengupayakan untuk area-area yang berpotensi menjadi destinasi wisata dapat direalisasikan dan dikelola secara tepat.

Guna mengendalikan masyarakat Kabupaten Bandung Barat dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata pedesaan diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan setiap

Received : 16 Jan 2025

Accepted : 16 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

kegiatan usaha pariwisata di daerah. Oleh Karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat menetapkan kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang penyelenggaraan kepariwisataan di daerah.

Tujuan penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Bandung Barat menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah, adalah:

- meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- melestarikan dan mengembangkan kebudayaan;
- mengangkat citra Daerah;
- memupuk rasa cinta tanah air;
- memperkuat kearifan lokal;
- mempererat persahabatan antar daerah dan antar bangsa;
- mengoptimalkan pendayagunaan produk lokal, regional dan nasional; dan
- mewujudkan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan kepariwisataan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Barat tersebut, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata dan bidang kebudayaan yang dimaksud adalah termasuk pembinaan dan pengembangan sarana dan objek wisata Mukapayung yang dinilai memiliki potensi wisata. Pengembangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Pengembangan potensi desa wisata berkelanjutan dilihat dari kondisi alam dan karakteristik kehidupan masyarakat di daerah tersebut, yang memiliki ciri khas masih alami.

Pembentukan desa wisata tak bisa lepas dari pembangunan infrastruktur, biaya promosi pariwisata tidak hanya berfokus pada sejumlah objek wisata, tetapi juga potensi lainnya, seperti

Received : 16 Jan 2025

Accepted : 16 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

wisata budaya, sejarah, pertanian, dan pendidikan. Bahkan, produk usaha kecil dan menengah (UMKM) juga berpotensi sebagai pariwisata kuliner. Indikasi-indikasi yang memperlihatkan belum efektifnya pengembangan Desa Wisata Mukapayung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat antara lain:

- 1) Belum memadainya infrastruktur jalan untuk menuju objek wisata.
- 2) Kegiatan Desa Wisata Mukapayung belum dapat meningkatkan perekonomian masyarakatnya.
- 3) Kurangnya fasilitasi dan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata oleh pemerintah daerah.
- 4) Kurangnya kerjasama antara pengelola dan pemerintah daerah juga pihak swasta.
- 5) Kurangnya kesadaran sebagian warga masyarakat untuk turut mengembangkan Desa Wisata Mukapayung.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanasi, karena dalam penelitian ini menggunakan dua variabel. Metode eksplanasi adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan dua variabel yang diteliti, yaitu variabel bebas dan variabel terikat yang kemudian menjelaskan hubungan atau pengaruh kedua variabel tersebut. Singarimbun (2011:46) mengatakan mengenai metode eksplanasi yaitu: “Apabila peneliti menjelaskan hubungan atau pengaruh kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis maka dinamakan penelitian penjelasan (*Eksplanatory Research*).”

Tipe penelitian menggunakan metode survey yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Variabel yang diteliti yaitu implementasi kebijakan Pemerintah Daerah sebagai variabel independen/bebas (X), dan variabel efektivitas pengembangan Desa Wisata Mukapayung di Kabupaten Bandung Barat sebagai variabel dependen/terikat (Y).

Penelitian ini dilakukan dengan menguji pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel

Received : 16 Jan 2025

Accepted : 16 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

terikat. Adapun desain penelitian yang peneliti gunakan adalah desain penelitian kausal. Seperti yang diutarakan Hasan (2002: 33) bahwa: “Desain penelitian kausal berguna untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, atau bagaimana satu variabel mempengaruhi variabel lainnya”.

Pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis kuantitatif berdasarkan informasi statistik. Pendekatan kuantitatif ini digunakan untuk meneliti sebuah populasi atau sampel tertentu, teknik yang dilakukan dalam pengambilan sampel pada pendekatan ini umumnya secara random, selain itu pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan instrumen penelitian, analisis data yang memiliki sifat kuantitatif atau secara statistik demi menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

KERANGKA PEMIKIRAN

Desa wisata merupakan sebuah konsep pengembangan daerah yang menjadikan desa sebagai destinasi wisata. Pengelolaan seluruh daya tarik wisata yang tepat diharapkan dapat memberdayakan masyarakat desa itu sendiri. Sesuai dengan prinsip utama dalam desa wisata, yaitu desa membangun. Konsep pengembangan Desa Wisata yang cukup gencar dilakukan di Kabupaten Bandung Barat dan daerah-daerah lain yang cukup banyak dijumpai menarik untuk dicermati dan bahkan dijadikan model pengembangan pariwisata. Fenomena banyaknya Desa-Desa Wisata di sejumlah daerah menunjukkan konsep Desa Wisata menarik untuk dijadikan model, hal ini dilandasi oleh keterjangkauan dari sisi finansial dan ketersediaan material berupa lokasi yang cukup menarik untuk dijadikan sebagai Desa Wisata. Namun yang dikembangkan soal ini lebih fokus pada eksploitasi alam yang memiliki sisi menarik dari segi keindahan alam saja, kurang memikirkan konsep pengembangan Desa Wisata dari sisi kelestarian lingkungan.

Fenomena pergeseran destinasi objek wisata ke pedesaan perlu dicermati, hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi dunia pariwisata di pedesaan, yang diharapkan mampu membangkitkan aktivitas ekonomi pedesaan. Kontribusi aktivitas Wisata Desa secara riil banyak ditunjukkan oleh Desa-Desa yang menggarap sektor pariwisata di pedesaan. Keberhasilan dalam mengelola Desa Wisata ditentukan oleh partisipasi dari para pemangku

Received : 16 Jan 2025

Accepted : 16 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

kepentingan, yakni Pemerintah Desa, swasta dan masyarakat. Perencanaan pembangunan yang terintegrasi dengan tujuan pembangunan berkelanjutan sekaligus mengakomodasi aspirasi masyarakat menjadi model pembangunan perdesaan, termasuk sektor pariwisata di perdesaan.

Guna mengendalikan masyarakat Kabupaten Bandung Barat dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata pedesaan diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan setiap kegiatan usaha pariwisata di daerah. Oleh Karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat menetapkan kebijakan- kebijakan yang mengatur tentang penyelenggaraan kepariwisataan di daerah.

Kebijakan diciptakan untuk mewujudkan suatu keadaan dan kondisi yang lebih baik. Keadaan dan kondisi yang dimaksud adalah suatu keadaan kesejahteraan. Kesejahteraan disini menitikberatkan kepada suatu kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi. Kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana, pelayanan publik yang efektif, efisien dan ekonomis, pembangunan dan lain sebagainya. Sejalan dengan Marshall bahwa: kebijakan adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara, melalui pelayanan sosial atau bantuan keuangan (Marshall 2003:21).

Permasalahan yang menyangkut implementasi kebijakan sering menjadi topik yang menarik baik di negara maju maupun di negara-negara yang sedang berkembang. Implementasi kebijakan tidak hanya sekedar merupakan mekanisme bagaimana menterjemahkan tujuan-tujuan kebijakan kepada prosedur rutin dan teknik, melainkan lebih jauh daripada itu, melibatkan berbagai faktor mulai dari sumber daya, hubungan antar unit organisasi, tingkat sumber daya, hubungan antar unit organisasi sampai kepada golongan politik tertentu yang mungkin tidak menyetujui terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan.

Suatu implementasi kebijakan biasanya berkaitan dengan suatu peraturan atau kebijakan dalam suatu daerah. Kebijakan merupakan suatu program-program yang dibuat oleh aktor-aktor baik itu instansi pemerintahan maupun instansi swasta dalam rangka memberikan solusi terhadap permasalahan yang sedang terjadi. Definisi kebijakan tersebut masih bersifat luas karena pembuatnya dapat berasal dari swasta maupun pemerintah, namun dalam penelitian ini kebijakan

Received : 16 Jan 2025

Accepted : 16 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

yang dimaksud adalah kebijakan publik, karena peneliti mengkaji suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat dan mampu untuk mengembangkan sumber daya masyarakat secara optimal.

Kajian peneliti dalam melihat berhasil tidaknya implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang kepariwisataan, dengan menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dari model implementasi kebijakan menurut Edwards III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Received : 16 Jan 2025

Accepted : 16 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

Implementasi kebijakan pada dasarnya berkaitan dengan proses, hasil, aktivitas dan tindakan untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan agar dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap kondisi dan situasi yang lebih baik. Proses merupakan suatu jenjang waktu dari pelaksanaan terhadap program-program yang telah dirumuskan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berjalan tidaknya suatu kebijakan tergantung dari prosesnya. Hasil merupakan suatu yang didapatkan setelah suatu program dilaksanakan. Aktivitas berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh aparatur dalam melaksanakan program-program. Tindakan merupakan perilaku dari aktor yang melaksanakan kebijakan dalam hal ini adalah aparatur pemerintahan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis Deskriptif merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui deskripsi empiris atau gambaran atas data yang dikumpulkan di dalam penelitian. Deskripsi variabel penelitian bertujuan untuk mengetahui gambaran masing-masing variabel penelitian yang disajikan dengan statistik deskriptif. Jawaban yang responden berikan akan dideskripsikan dalam bentuk nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dan standar deviasi. Hasil statistik deskriptif variabel penelitian menggunakan program SPSS dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Descriptive Statistics					
	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Implementasi kebijakan Pemda	72	22	55	35.28	7.812

Received : 16 Jan 2025

Accepted : 16 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

Efektivitas Pengembangan Desa Wisata Mukapayung	72	19	50	31.54	7.186
Valid N (listwise)	72				

Sumber: Hasil Olahan SPSS, 2024

Hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini dapat dijelaskan yaitu:

- a. Implementasi kebijakan Pemerintah Daerah tentang penyelenggaraan kepariwisataan

Variabel implementasi kebijakan Pemda memiliki nilai minimum sebesar 22 dan nilai maksimum sebesar 55. Variabel implementasi kebijakan Pemda yang diukur dengan 11 item pernyataan dengan pengukuran Skala Likert 5 poin memiliki nilai rata-rata sebesar 35.28 dengan nilai standar deviasi sebesar 7.812. Nilai standar deviasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata, yang artinya sebaran jawaban responden terkait variabel implementasi kebijakan Pemda sudah merata.

- b. Efektivitas pengembangan Desa Wisata Mukapayung

Variabel efektivitas pengembangan Desa Wisata Mukapayung memiliki nilai minimum sebesar 19 dan nilai maksimum sebesar 50. Variabel efektivitas pengembangan Desa Wisata Mukapayung yang diukur dengan 10 item pernyataan dengan pengukuran Skala Likert 5 poin memiliki nilai rata-rata sebesar 31.54, dengan nilai standar deviasi sebesar 7.186. Hal ini berarti nilai standar deviasi ini lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata, yang artinya sebaran jawaban responden terkait efektivitas pengembangan Desa Wisata Mukapayung sudah merata.

a. Analisis Deskriptif Variabel Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah (X)

Pada sub bab ini akan dipaparkan data hasil tanggapan responden yang berfungsi untuk memperjelas hasil pembahasan. Dengan gambaran data responden, peneliti dapat mengetahui bagaimana kondisi setiap dimensi yang diteliti. Penelitian ini akan dianalisis masing-masing sub variabelnya secara deskriptif dengan menggunakan perhitungan pengkategorian. Untuk memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data penelitian,

Received : 16 Jan 2025

Accepted : 16 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

klasifikasi data penelitian dibuat menggunakan distribusi frekuensi dengan interval yang sama. sedangkan untuk melihat penilaian responden terhadap setiap variabel yang diteliti dapat dilihat dari nilai prosentase dari hasil skor aktual dan ideal yang diperoleh yang disajikan untuk setiap indikator, yang dilengkapi dengan garis kontinum.

Guna mengetahui tingkat signifikansi dan pengaruh pada variabel implementasi kebijakan Pemerintah Daerah, maka peneliti akan mengukur implementasi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap sub variabel (dimensi) yang terdiri dari: a) Komunikasi; b) Sumber daya; c) Disposisi, dan d) Struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi kebijakan Pemda menjadi tolok ukur tingkat implementasi kebijakan. Untuk mengetahui jawaban responden mengenai pengaruh komunikasi, maka peneliti menyebarkan kuesioner kepada 72 responden. Hasil jawaban kuesioner tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel Tanggapan responden terhadap komunikasi

Item Pernyataan	Skor Jawaban										Skor	%
	5		4		3		2		1			
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%		
X.1	5	6.94	12	16.67	44	61.11	11	15.28	0	0	227	21.02
X.2	5	6.94	12	16.67	44	61.11	11	15.28	0	0	227	21.02
X.3	6	8.33	11	15.28	46	63.89	9	12.50	0	0	230	21.30
Skor Aktua l											684	
Skor Ideal 5 x 3 x 72											1.080	63.33

Sumber: olahan data primer, 2024

b. Sumber daya

Dalam mengukur sumber daya implementasi kebijakan menjadi tolok ukur tingkat implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang penyelenggaraan kepariwisataan. Untuk mengetahui jawaban responden mengenai pengaruh sumber daya, maka peneliti

Published :10 Feb 2025

[illegible]

Received : 16 Jan 2025

Accepted : 16 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

Skor Ideal 5 x 3 x 72											1080	64.44
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	-------

Sumber: olahan data primer, 2024

d. Struktur birokrasi

Menurut pandangan Edwards sumber-sumber yang penting meliputi, staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. Untuk mengetahui jawaban responden mengenai dimensi struktur birokrasi, maka peneliti menyebarkan kuesioner kepada 72 responden. Adapun hasil jawaban kuesioner tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel Tanggapan responden terhadap struktur birokrasi

Item Pernyataan	Skor Jawaban										Skor	%
	5		4		3		2		1			
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%		
X.9	5	6.94	14	6.94	44	61.11	9	12.50	0	0	231	21.39
X.10	5	6.94	14	6.94	45	62.50	8	11.11	0	0	232	21.48
X.11	5	6.94	17	23.61	43	59.72	7	9.72	0	0	236	21.85
Skor Aktua l											699	
Skor Ideal 5 x 3 x 72											1080	64.72

Sumber: olahan data primer, 2024

Berdasarkan hasil keseluruhan tanggapan rersponden terhadap variabel implementasi kebijakan pemerintah daerah, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan peringkat untuk variabel tersebut dilihat dari perbandingan antara skor aktual dengan skor ideal. Skor aktual diperoleh melalui hasil perhitungan seluruh pendapat responden sesuai klasifikasi bobot yang diberikan (1,2,3,4, dan 5). Sedangkan skor ideal diperoleh melalui perolehan prediksi nilai tertinggi dikalikan dengan jumlah kuesioner dikalikan jumlah responden. Adapun hasil

Received : 16 Jan 2025

Accepted : 16 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

penetapan peringkat variabel implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Capaian Tanggapan Responden Terhadap Implementasi Kebijakan
Pemerintah Daerah (X)

No	Dimensi	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Komunikasi	684	1080	63.33	Cukup
2	Sumber daya	461	720	64.02	Cukup
3	Disposisi	696	1080	64.44	Cukup
4	Struktur birokrasi	699	1080	64.72	Cukup
	Jumlah	2540	3960		
	Skor Aktual/Skor Ideal x 100%	64.14%			Cukup

Sumber: Hasil olahan kuesioner, 2024

Berdasarkan perhitungan tabel tersebut, variabel implementasi kebijakan pemerintah daerah yang diukur dengan 11 item pernyataan memperoleh nilai tingkat capaian responden sebesar 64.14% dimana nilai tersebut termasuk dalam kategori Cukup karena berada pada rentang nilai 52.01% – 68.00%. Terdapat persentase skor tertinggi sebesar 64.72% pada dimensi struktur birokrasi, sedangkan persentase dimensi terendah sebesar 63.33% pada dimensi komunikasi.

b. Analisis Deskriptif Variabel Efektivitas Pengembangan Desa Wisata Mukapayung di Kabupaten Bandung Barat (Y)

Efektivitas merupakan derajat pencapaian keberhasilan dari target yang telah ditetapkan organisasi publik atau instansi lainnya. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Dalam mencapai tujuan organisasi tersebut maka harus melalui beberapa pengukuran efektivitas program. Guna mengetahui tingkat signifikansi dan pengaruh pada variabel efektivitas pengembangan Desa Wisata Mukapayung, maka peneliti menggunakan dimensi yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program.

1. Ketepatan sasaran program

Received : 16 Jan 2025

Accepted : 16 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

Ketepatan sasaran program yaitu sejauh mana ketepatan program dalam menjangkau sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ketepatan sasaran telah ditentukan oleh pemerintah, sangat penting untuk melihat apakah Program Desa Wisata Mukapayung di Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dalam pengembangan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bandung Barat.

Untuk mengetahui jawaban responden terhadap ketepatan sasaran program, maka peneliti menyebarkan kuesioner kepada 72 responden. Adapun hasil jawaban kuesioner tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel Tanggapan responden terhadap ketepatan sasaran program

Item Pernyataan	Skor Jawaban										Skor	%
	5		4		3		2		1			
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%		
Y.1	5	6.94	14	19.44	38	52.78	15	20.83	0	0	225	20.83
Y.2	5	6.94	15	20.83	29	40.28	23	31.94	0	0	218	20.19
Y.3	5	6.94	13	18.06	38	52.78	16	22.22	0	0	223	20.65
Skor Aktua l											666	
Skor Ideal 5 x 3 x 72											1080	61.67

Sumber: olahan data primer, 2024

2. Sosialisasi program

Sosialisasi program adalah kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat kepada umumnya, dan sasaran peserta program pada khususnya. Pengukuran efektivitas pengembangan desa wisata mukapayung dilakukan dengan menggunakan dimensi sosialisasi program. Untuk melihat hasil penelitian terhadap sosialisasi program, maka peneliti menyebarkan kuesioner kepada 72 responden. Adapun hasil jawaban kuesioner tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel Tanggapan responden terhadap sosialisasi program

Received : 16 Jan 2025

Accepted : 16 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

[illegible]

Sumber: olahan data primer, 2024

3. Tujuan program

Tujuan program desa wisata mukapayung adalah untuk percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa. Karena itu, tiap daerah dan desa perlu mencermati potensi yang dimilikinya untuk diangkat dan dikembangkan agar memberikan nilai tambah manfaat serta menghasilkan produktivitas yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Untuk melihat hasil penelitian terhadap tujuan program, maka peneliti menyebarkan kuesioner kepada 72 responden. Adapun hasil jawaban kuesioner tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel Tanggapan responden terhadap tujuan program

[illegible]

Received : 16 Jan 2025

Accepted : 16 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

1												
Skor Ideal 5 x 3 x 72											108 0	63.2 4

Sumber: olahan data primer, 2024

4. Pemantauan program

Pemantauan program dapat diartikan kegiatan pendampingan dan pembinaan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program desa wisata mukapayung sebagai bentuk perhatian kepada pengelola wisata maupun masyarakat yang terlibat dalam kegiatan wisata desa.

Untuk melihat hasil penelitian terhadap pemantauan program, maka peneliti menyebarkan kuesioner kepada 72 responden. Adapun hasil jawaban kuesioner tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel Tanggapan responden terhadap pemantauan program

Item Pernyataan	Skor Jawaban										Skor	%
	5		4		3		2		1			
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%		
Y.9	1	1.39	14	19.44	9	12.50	43	59.72	5	6.94	179	24.86
Y.10	3	4.17	13	18.06	7	9.72	49	65.28	0	0	186	25.83
Skor Aktual											365	
Skor Ideal											720	50.69
5 x 2 x 72												

Sumber: olahan data primer, 2024

Berdasarkan hasil seluruh tanggapan responden terhadap variabel efektivitas pengembangan Desa Wisata Mukapayung, maka selanjutnya adalah menetapkan peringkat untuk variabel efektivitas dilihat dari perbandingan antara skor aktual dengan skor ideal. Skor aktual diperoleh melalui hasil perhitungan seluruh pendapat responden sesuai klasifikasi bobot yang

Received : 16 Jan 2025

Accepted : 16 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

diberikan (1,2,3,4, dan 5). Sedangkan skor ideal diperoleh melalui perolehan prediksi nilai tertinggi dikalikan dengan jumlah kuesioner dikalikan jumlah responden. Adapun hasil penetapan peringkat variabel efektivitas pengembangan desa wisata Mukapayung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Capaian Tanggapan Responden Terhadap Efektivitas Pengembangan Desa
Wisata Mukapayung (Y)

No	Dimensi	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Ketepatan sasaran program	666	1080	61.67	Cukup
2	Sosialisasi program	461	720	64.03	Cukup
3	Tujuan program	683	1080	63.24	Cukup
4	Pemantauan program	365	720	50.69	Kurang Baik
	Jumlah	2175	3600		
	Skor Aktual/Skor Ideal x 100%	60.42%			Cukup

Sumber: Hasil olah data primer, 2024

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya, bahwa implementasi kebijakan Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengembangan Desa Wisata Mukapayung di Kabupaten Bandung Barat. Maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis deskriptif implementasi kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan pengukuran empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan termasuk dalam kategori "Cukup" dengan skor capaian tanggapan responden sebesar 64.14% (52.01% - 68.00%). Dapat diinterpretasikan bahwa persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan Pemerintah Daerah tentang penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Bandung Barat termasuk dalam predikat cukup. Terdapat persentase skor tertinggi sebesar 64.72% pada dimensi struktur birokrasi, sedangkan persentase dimensi terendah sebesar 63.33% pada dimensi komunikasi.

Received : 16 Jan 2025

Accepted : 16 Jan 2025

Published : 10 Feb 2025

2. Analisis deskriptif efektivitas pengembangan Desa Wisata Mukapayung di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan empat variabel pengukuran efektivitas termasuk dalam kategori "Cukup" dengan skor capaian tanggapan responden sebesar 60.42% (52.01% - 68.00%). Dapat diinterpretasikan bahwa persepsi masyarakat terhadap pengembangan Desa Wisata Mukapayung di Kabupaten Bandung Barat termasuk dalam predikat cukup. Terdapat persentase skor tertinggi sebesar 64.03% pada dimensi sosialisasi program, sedangkan persentase dimensi terendah sebesar 50.69% pada dimensi pemantauan program.
3. Hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa implementasi kebijakan Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengembangan Desa Wisata Mukapayung di Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan uji hipotesis nilai t hitung (23.60) > t tabel (1.66691) dengan taraf signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$, ini berarti hipotesis alternatif (H_a) diterima sedangkan hipotesis nol (H_0) ditolak.
4. Besarnya pengaruh implementasi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap efektivitas pengembangan Desa Wisata Mukapayung di Kabupaten Bandung Barat melalui perhitungan koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 0.885 atau 78.32%, sehingga sisanya 21.68% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.
5. Peneliti menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara implementasi kebijakan Pemerintah Daerah terhadap efektivitas pengembangan Desa Wisata Mukapayung di Kabupaten Bandung Barat, sehingga hipotesis penelitian yang peneliti ajukan yaitu: Implementasi kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan faktor-faktor implementasi kebijakan berpengaruh terhadap efektivitas pengembangan Desa Wisata Mukapayung di Kabupaten Bandung Barat, telah teruji secara empirik melalui penelitian di lapangan.

Received : 16 Jan 2025

Accepted : 16 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

DAFTAR PUSTAKA**BUKU :**

- Kotler, Philip. 2000. *Prinsip-Prinsip Pemasaran Manajemen*, Jakarta: Prenhalindo. Levy & Weitz. 2001. *Retailing Management, 4th edition*. New York: Mc.Graw Hill, Irwin Levy.
- Sudriamunawar, Haryono. 2006. *Kepemimpinan, Peran Serta Dan Produktivitas*. Mandar Maju. Bandung.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta. _____ 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana. Sutopo dan Sugiyanto. 2001. *Analisis Kebijakan Publik*. LAN-RI.
- Suradinata, Ermaya, 2002, *Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Government and Regional Autonomy Management)*. Bandung. Ramadhan,
- Suwandi, Pendit Nyoman. 2006. *Ilmu Pariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita. Syafie, Inu Kencana. 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Edisi Revisi 2001. Jakarta: Refika Aditama.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Aipi Puslit KP2W Lemlit UNPAD.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press.
- Wasistiono, Sadu. 2001. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Sumedang: Alqaprint Jatinangor
- Winarno, Budi. 2012. *Teori Dan proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media press.

DOKUMEN :

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah*. Eksemplar Lepas.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang *Kepariwisataaan*. Eksemplar Lepas.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang *Penyelenggaraan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan*. Eksemplar Lepas.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang *Penyelenggaraan Kepariwisataaan Daerah*. Eksemplar Lepas.

Received : 16 Jan 2025

Accepted : 16 Jan 2025

Published : 10 Feb 2025

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 53 Tahun 2021 tentang *Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan*. Eksemplar Lepas.